



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 162/KPT.W11-U/SK.HM1.1.1/IV/2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 33.a/KPT.W11-U/SK.HM1.1/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dijelaskan bahwa Daftar Informasi Publik memuat nomor, nama informasi, unit kerja yang menyediakan informasi, penanggung jawab informasi, waktu dan tempat pembuatan, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan/retensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesias Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan ...



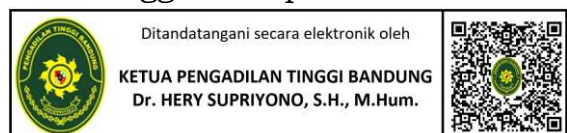
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 33.a/KPT.W11-U/SK.HM1.1/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
- Kedua : Menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung;
- Ketiga : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA merupakan Informasi Publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengann kegiatan setiap unit kerja, meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi Bandung;
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.
- Keempat : Informasi lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, maka ditetapkan dalam keputusan tersendiri sebagai informasi yang dikecualikan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 April 2026



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026
Pada Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 162/KPT.W11-U/SK.HM1.1.1/IV/2026
Tanggal : 20 April 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN 2026**

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN TINGGI BANDUNG

A. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Tinggi Bandung

1. Profil Pengadilan, meliputi :
 - a. Fungsi, tugas, dan yurisdiksi Pengadilan;
 - b. Struktur Organisasi Pengadilan;
 - c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
 - d. Daftar Nama dan Pejabat Pengadilan;
 - e. Profil Singkat Pejabat Struktural; dan
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Tinggi Bandung yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
3. Biaya berperkara di Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Agenda Sidang.

B. Informasi yang berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas biaya perkara banding cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
4. Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan permohonan informasi perkara baik informasi perkara banding serta permohonan keberatan atas informasi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan yang dimohonkan;
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

C. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas :
 - a. Nama Program dan Kegiatan;
 - b. Penanggung jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;



- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 3. Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Neraca laporan arus kas dan catatan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 4. Ringkasan daftar asset dan inventaris (Laporan BMN);
 5. Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundang-undangan terkait.
- D. Informasi Laporan Akses Informasi
- Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan yang ditolak; dan
 4. Alasan penolakan permohonan informasi.

II. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Pengadilan Tinggi Bandung mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

A. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotocopy atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
2. Informasi dalam buku Register Perkara;
3. Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara;
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
5. Laporan penanganan biaya perkara.

B. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan

Surat Keputusan dan Instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

C. Informasi tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan

1. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan;
2. Profil Hakim dan Pegawai;
3. Data Statistik Kepegawaian;
4. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya;



5. Surat-Surat Perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya.

III. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

Pengadilan Tinggi Bandung menyajikan informasi berupa Berita, Pengumuman dan lain-lain.

IV. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

A. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

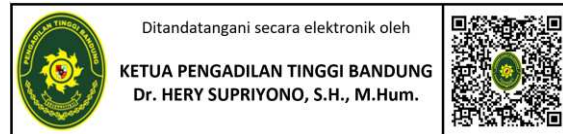
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat kepentingan perlindungan hak atas keyakinan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan ekonomi nasional;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau antara Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

V. TERMASUK DALAM KATEGORI INFORMASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BUTIR IV HURUF (A), ANTARA LAIN :

1. Informasi dalam proses Musyawarah Hakim;
2. Identitas lengkap Hakim dan Pegawai yang diberikan sanksi;
3. SKP atau evaluasi kinerja Hakim dan Pegawai;
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Hakim dan



- Pegawai;
5. Identitas Hakim dan Pegawai yang diperoleh dalam proses layanan Petugas;
 6. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan Hakim dalam perkara-perkara tertentu.



LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026
Pada Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 162/KPT.W11-U/SK.HM1.1.1/IV/2026
Tanggal : 20 April 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2026**

No.	Nama informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu/Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Bandung	Softcopy	1 Tahun
2	Struktur organisasi Pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
3	Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2015, Bandung	Softcopy	1 Tahun
4	Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
5	Profil pejabat struktural	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
6	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun



No.	Nama informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu/Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1	2	3	4	5	6	7
7	Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.	Kepaniteraan	Panmud Tingkat Banding	2026, Bandung	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
8	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lainnya	Kepaniteraan	Panmud Tingkat Banding	2026, Bandung	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
9	Agenda sidang	Kepaniteraan	Panmud Tingkat Banding	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
10	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
11	Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun



No.	Nama informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu/Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1	2	3	4	5	6	7
12	Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak- pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
13	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
14	Rencana dan laporan realisasi anggaran	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	2026, Bandung	Softcopy	3 Bulan
15	Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	2025, Bandung	Softcopy	3 Bulan



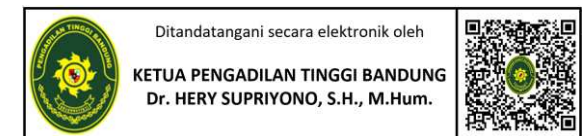
No.	Nama informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu/Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1	2	3	4	5	6	7
16	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Bandung	Hardcopy	1 Tahun
17	Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap	Kepaniteraan	Panmud Tingkat Banding	Bandung	Softcopy	1 Tahun
18	Informasi dalam Buku Register Perkara	Kepaniteraan	Panmud Tingkat Banding	Bandung	Hardcopy	1 Tahun
19	Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara.	Kepaniteraan	Panmud Hukum	Bandung	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun
20	Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan	Kepaniteraan / Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag • Panmud Tingkat Banding • Kasubbag Tingkat Banding 	Bandung	Softcopy	1 Tahun



No.	Nama informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu/Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1	2	3	4	5	6	7
21	Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan	Kepaniteraan / Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag • Panmud Tingkat Banding • Kasubbag Tingkat Banding 	Bandung	Softcopy	1 Tahun
22	Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik	Kepaniteraan / Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag • Panmud Tingkat Banding • Kasubbag Tingkat Banding 	Bandung	Softcopy	1 Tahun
23	Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
24	Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
25	Profil Hakim dan Pegawai	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun



No.	Nama informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu/Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1	2	3	4	5	6	7
26	Anggaran pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	2025, Bandung	Softcopy	1 Tahun
27	Profil Role Model	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
28	Profil Agen Perubahan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
29	Jenis Layanan PTSP	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
30	Informasi Jam Kerja Pengadilan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
31	Kompensasi Layanan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
32	Informasi Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Kepegawaian dan TI	2026, Bandung	Softcopy	1 Tahun
33	Laporan Tahunan	Kesekretariatan	Kabag/Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	2025, Bandung	Softcopy	1 Tahun
34	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2026, Bandung	Softcopy	3 Bulan
35	Laporan Survei Persepsi Korupsi	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2026, Bandung	Softcopy	3 Bulan



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026

Pada Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor : 162/KPT.W11-U/SK.HM1.1.1/IV/2026

Tanggal : 20 April 2026

**FORMAT
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

1. *(diisi sesuai dengan Daftar Informasi Publik Perkara Perdata / Pidana / Tindak Pidana Khusus Korupsi yang dimutakhirakan)*
2. *(diisi sesuai dengan Daftar Informasi Publik Perkara Perdata / Pidana / Tindak Pidana Khusus Korupsi yang dimutakhirakan)*
3. *(diisi sesuai dengan Daftar Informasi Publik Perkara Perdata / Pidana / Tindak Pidana Khusus Korupsi yang dimutakhirakan)*

Bandung,.....

Panitera Muda.....

(Nama)

